

## Senjata Konvensional dalam Strategi Nuklir

A.R. SUTOPO\*

Dalam zaman nuklir sekarang, pembicaraan mengenai persenjataan strategis umumnya dikaitkan dengan, dan terutama berarti, senjata-senjata nuklir dengan daya jangkauan menghancurkan kekuatan lawan di tempatnya. Demikianpun dalam pembicaraan tentang konflik strategis, konotasi nuklir sering tidak dapat dipisahkan. Senjata nuklir dianggap begitu efisien dalam menghancurkan sasaran-sasaran yang dituju sehingga orang sering menjulukinya sebagai senjata pemungkas. Ditilik dari akibat-akibat kehancuran yang ditimbulkan, senjata nuklir memiliki kemampuan berkali lipat dari senjata konvensional sehingga dari segi ini semata-mata fungsi senjata konvensional bukan tandingannya.

Tetapi ternyata masuknya persenjataan nuklir dalam jajaran kekuatan militer dan pertahanan suatu negara tidak menghilangkan peran persenjataan konvensional sebagai salah satu komponen penting kekuatan pertahanan dan militer. Sekurang-kurangnya pengalaman kurang lebih 40 tahun terakhir ini membenarkan keadaan tersebut. Negara-negara yang memiliki persenjataan nuklir tidak serta-merta membiarkan tingkat kesiap-siagaan dan modernisasi kekuatan konvensionalnya terbenakelai. Bahkan terdapat petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa negara-negara itu juga melakukan peningkatan kesiap-siagaan dan modernisasi kekuatan konvensionalnya. Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan RRC hingga kini terus melakukan usaha-usaha tersebut sekalipun kekuatan nuklir mereka masing-masing dari waktu ke waktu makin canggih. Demikian pun sebagian besar negara-negara non-nuklir terus berusaha meningkatkan persenjataan dan kekuatan militernya; dan situasinya tampak jelas terutama di antara negara-negara yang terlibat konflik dan sengketa-sengketa.

Persenjataan nuklir dan konvensional pada dasarnya adalah satu variabel yang fungsi utamanya -- dalam hubungan antarnegara -- adalah sebagai perangkat perang dan alat pengancam. Akan tetapi dalam analisa akhir, fungsi persenjataan adalah sebagai alat perang; dan perang dalam pengertian sempit -- penggunaan kekerasan -- adalah salah satu wasit untuk mempertahankan atau mencapai tujuan tertentu. Dari sebab itu anggapan yang cukup luas diterima mengatakan bahwa perang itu adalah sekedar lanjutan dari politik dengan cara lain. Dengan ini hendak dikatakan bahwa persenjataan adalah sekedar alat untuk keperluan perang sebagai lanjutan dari kepentingan politik yang hendak dicapai dengan mempergunakan kekerasan untuk memaksa lawan memenuhi kehendaknya. Tidak semua keinginan atau tujuan politik memiliki bobot dan prioritas yang sama antara satu dengan lainnya, sehingga konsekuensinya adalah tidak setiap perangkat perang cocok untuk mencapai tujuan politik tertentu melalui cara lain (perang).

Telaah ini akan membicarakan peranan atau tempat dari persenjataan konvensional dalam strategi nuklir. Perhatian utama akan dicurahkan pada persoalan mengapa negara-negara yang telah memiliki persenjataan nuklir masih terus memelihara kekuatan konvensionalnya. Kehadiran persenjataan nuklir telah dianggap sebagai bagian kehidupan yang tidak dapat dihindari dalam konfigurasi kekuatan militer dari sekurang-kurangnya negara-negara yang telah memilikinya. Tetapi tidak satu pun dari konflik yang dihadapi oleh negara-negara nuklir yang melibatkan penggunaan kekerasan setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki melibatkan persenjataan nuklir. Pengalaman sejak berakhirnya Perang Dunia II ini secara nyata menunjukkan bahwa persenjataan konvensional mempunyai tempat dalam keseluruhan kebijakan pertahanan dan militer negara-negara nuklir. Di lain pihak, banyak negara-negara regional yang dalam usahanya memperkuat diri memenuhi kebutuhan perangkat militernya memperolehnya dari negara-negara nuklir sebagai pemasok senjata-senjata konvensional modern terbesar. Dan walaupun mereka secara langsung atau tidak langsung bersekutu dengan salah satu negara nuklir, keterlibatan mereka dalam konflik dengan negara tetangganya sering dianggap sebagai salah satu konsekuensi dari makin banyaknya persenjataan konvensional yang diberikan oleh negara-negara maju kepada mereka.

Pertimbangan-pertimbangan moral -- seperti misalnya bahwa dalam perang modern penggunaan senjata nuklir lebih tidak bermoral daripada persenjataan konvensional -- bukan merupakan bagian penting dalam telaah ini. Yang lebih dipentingkan adalah fungsi persenjataan sebagai peralatan perang untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan perkataan lain, apakah harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan politik tertentu dengan mempergunakan jenis persenjataan tertentu seimbang? Dan jika harga itu terlalu mahal sehingga tidak sepadan dengan tujuan politiknya, apakah penggunaan perang sebagai cara lain untuk mencapai tujuan politik masih lebih menguntungkan?

oleh sesuatu pihak? Tetapi ini bukan berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral berkenaan dengan penggunaan kekerasan tidak mempunyai arti lagi dalam hubungan kepentingan antarnegara.

Hingga kini argumen-argumen tradisional untuk membatasi sasaran yang perlu dihancurkan dalam suatu konflik bersenjata, termasuk dalam pemikiran strategi nuklir, dengan sebesar mungkin menghindari sasaran-sasaran sipil, masih tetap menjadi bagian penting dari kaidah-kaidah penggunaan kekerasan. Meskipun dalam zaman sekarang ini sulit sekali membayangkan adanya suatu medan pertempuran yang sejauh mungkin dapat menghindari jatuhnya korban sipil, yaitu suatu medan yang sangat sedikit dihuni oleh manusia, seperti daerah gurun pasir atau mungkin wilayah lautan yang jauh dari lalu-lintas kapal sipil, anggapan-anggapan penghancuran kekuatan bersenjata lawan sebagai jalan terpendek untuk mengalahkannya masih tetap menjadi bagian yang sangat penting dalam konflik. Ini berlaku baik dalam pemikiran mengenai penggunaan persenjataan konvensional maupun dalam pemikiran strategi nuklir. Dalam hal strategi nuklir dikenal misalnya doktrin *counter-force* (menghancurkan potensi perang lawan). Dalam konflik konvensional hal ini tampaknya juga ingin dipraktekkan untuk memaksa musuh segera menyerah atau mengakhiri peperangan. Tetapi dalam konflik-konflik bersenjata jatuhnya korban-korban di kalangan penduduk sipil beserta harta kekayaannya bukan merupakan hal yang aneh. Dan lebih menonjol lagi, dalam pemikiran strategi nuklir sekarang tidak tertutup kemungkinan justru menjadikan penduduk sebagai sasaran yang akan dihancurkan untuk memaksa lawan menghentikan perang atau menyerah, seperti yang tercermin dalam doktrin *counter-value*.

Dalam pembicaraan mengenai kaitan kekuatan konvensional dan kekuatan nuklir hingga kini belum terdapat suatu "laboratorium" yang telah menguji secara aktual kebenaran kaitan itu. Yang terjadi adalah anggapan-anggapan yang digambarkan dalam suatu konstruksi pemikiran mengenai kaitan penggunaan kekuatan konvensional dalam suatu konflik yang mungkin timbul antara negara-negara berkekuatan nuklir. Pemikiran-pemikiran demikian ini yang paling maju dikembangkan dan terbuka sumber-sumbernya adalah yang dilakukan oleh NATO. Oleh karena itu telaah ini akan banyak mempergunakan konsep-konsep pemikiran yang dianut oleh NATO mengenai kaitan antara senjata konvensional dan senjata nuklir dalam strategi dewasa ini. Bisa jadi pengembangan pemikiran mengenai bidang ini yang dilakukan oleh NATO, khususnya Amerika Serikat, dapat dipergunakan untuk menerangkan tingkah-laku berbagai negara nuklir yang terlibat dalam sengketa dan konflik selama ini, meskipun orang harus sangat berhati-hati untuk tidak terlalu mudah menggunakan "paradigma" NATO itu sebagai jalan pemikiran final.

Telah menjadi suatu hal yang lazim bahwa fungsi persenjataan nuklir dalam strategi dewasa ini adalah sebagai alat penangkal dalam memelihara dan mencapai tujuan politik, khususnya dalam mengikhtiarkan agar pihak yang dianggap lawan dan bersifat ofensif tidak mempergunakan ancaman atau kekerasan senjata. Fungsi penangkalan inilah yang ingin digali dalam telaah ini dalam mengkaitkan persenjataan nuklir dan persenjataan konvensional. Hingga sekarang belum pernah terjadi perang nuklir antarnegara nuklir. Sedangkan konflik yang pernah melibatkan penggunaan senjata antara dua negara berkekuatan nuklir adalah antara RRC dan Uni Soviet dalam skala terbatas pada tahun 1969, yang hanya melibatkan kekuatan konvensional mereka. Pengalaman konflik mereka itu barangkali dapat menjadi ilustrasi untuk memperkuat pemikiran yang diajukan oleh NATO dalam memahami kaitan antara persenjataan nuklir dan persenjataan konvensional dalam hubungan-hubungan strategis dengan titik berat penghindaran terjadinya konflik nuklir.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara Eropa Barat pada umumnya beranggapan bahwa ancaman utama terhadap keamanan mereka berasal dari Uni Soviet. Uni Soviet dilihat sebagai negara yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam perdamaian dan stabilitas di Eropa yang baru saja dihancurkan oleh akibat-akibat perang. Selain Uni Soviet dianggap sebagai suatu kekuatan yang karena pertimbangan ideologis agresif dan ekspansionis, negeri itu memiliki kekuatan militer, yang dalam era sekarang disebut sebagai kekuatan konvensional, yang sangat besar. Sementara negara-negara Eropa Barat melakukan demobilisasi, Uni Soviet terus mempertahankan kekuatannya setelah perang usai. Kekuatan konvensional Soviet yang jauh lebih besar -- sekurang-kurangnya secara kuantitatif -- itulah yang makin memperbesar ketakutan negara-negara Eropa Barat terhadap ancaman Soviet, yang juga dianggap demikian oleh Amerika Serikat.

Untuk menghadapi ancaman yang dipikirkan itu negara-negara Eropa Barat, bersama dengan Amerika Serikat dan Kanada, kemudian membentuk persekutuan pertahanan NATO pada tahun 1949. Pembentukan pakta pertahanan NATO ini mengkaitkan persenjataan nuklir, yang hingga saat ini dimonopoli Amerika Serikat, dengan pertahanan NATO-Eropa. Jika Uni Soviet melakukan serangan (konvensional) terhadap Eropa Barat, senjata-senjata nuklir AS akan dipergunakan untuk menghancurkan sasaran-sasaran di dalam wilayah Soviet sehingga yang disebutkan belakangan itu akan mengakhiri peperangan atau bahkan bertekuk-lutut. Dengan perkataan lain, superioritas kekuatan konvensional Soviet ditangkal oleh NATO-Eropa dengan pengun-

naan kekuatan nuklir AS sebab kekuatan konvensional NATO di Eropa adalah sangat kecil untuk mampu menghadapinya.

Akan tetapi tidak lama setelah NATO dibentuk, dalam tahun 1949 itu juga Uni Soviet berhasil membuat senjata nuklirnya sendiri. Keadaan ini mempengaruhi pemikiran mengenai fungsi senjata nuklir AS di masa depan oleh karena cepat atau lambat Uni Soviet juga akan mampu melakukan pembalasan nuklir terhadap AS seperti yang diperhitungkan oleh laporan sandi NSC-68 yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional AS tahun 1950. Menghadapi situasi demikian itu, NSC-68 menyarankan agar negara-negara NATO meningkatkan kekuatan konvensionalnya untuk menghadapi ancaman konvensional Soviet. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang dikemukakan oleh NSC-68 itu, dan karena pecahnya Perang Korea, negara-negara NATO kemudian bersepakat di Lisabon pada tahun 1952 untuk meningkatkan kekuatan konvensional mereka. Peningkatan kekuatan konvensional NATO yang disetujui itu terutama dimaksudkan untuk menghadapi kemungkinan serangan konvensional terbatas oleh Uni Soviet, sehingga senjata nuklir tidak secara otomatis dipergunakan dalam menghadapi konflik dengan Uni Soviet.

Kendati demikian, dalam kenyataannya negara-negara NATO-Eropa tidak meningkatkan kekuatan konvensionalnya seperti yang telah disepakati di Lisabon tersebut. Negara-negara Eropa Barat sendiri tampaknya tidak mempunyai kemauan politik untuk mewujudkan keputusan yang telah diambil oleh para Menteri Pertahanan itu. Di samping itu, karena mereka masih menghadapi rekonstruksi negara masing-masing dari akibat-akibat Perang Dunia II, kemampuan keuangan dan ekonomi mereka masih sangat terbatas sehingga janji untuk meningkatkan kekuatan konvensional mereka itu tak pernah terwujud. Sedangkan Amerika Serikat sendiri, dengan bergantinya Presiden dari Truman ke Eisenhower, kemudian lebih memusatkan perhatiannya kepada eksploitasi persenjataan nuklir sebagai tulang-punggung untuk mendukung strateginya, terutama dalam mengantisipasi kemampuan Soviet untuk melakukan serangan terhadap daratan Amerika.

Amerika Serikat, yang dalam strategi deterrence ini menjadi tulang-punggung keamanan NATO, kemudian mendasarkan strategi pertahanannya pada doktrin *massive retaliation*, termasuk dalam melindungi sekutu-sekutunya di Eropa Barat. Berdasarkan pada doktrin *massive retaliation* ini, suatu serangan konvensional oleh Uni Soviet terhadap Eropa Barat akan memberi alasan dilakukannya pembalasan dengan persenjataan nuklir. Dengan perkataan lain, strategi *massive retaliation* merupakan strategi *first use* senjata nuklir dalam menghadapi ancaman bersenjata terhadap NATO. Dianutnya doktrin yang demikian ini oleh karena pada waktu itu negara-negara NATO masih

yakin bahwa Amerika Serikat memiliki keunggulan nuklir dan sistem persenjataan jarak jauh (pembom) yang dapat menghancurkan kota-kota Soviet secara efektif. Karena itu negara-negara NATO-Eropa pada umumnya tidak terlalu mempersoalkan kredibilitas doktrin *massive retaliation*, dan pada tahun 1957 doktrin ini secara resmi diterima sebagai strategi NATO.

Menjelang akhir dasawarsa 1950-an, Uni Soviet telah mempunyai kemampuan untuk mencapai sasaran-sasaran di daratan Amerika Serikat dengan mempergunakan pembom jarak jauh dan rudal nuklir ICBM. Sejak pertengahan dasawarsa 1950-an Uni Soviet juga telah mengikuti pengembangan pembom jarak jauh seperti yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, tetapi tampaknya ia tidak terlalu berhasil dalam hal ini. Keberhasilan Soviet justru ditunjukkan dalam bidang satelit yang mendahului Amerika Serikat dengan peluncuran Sputnik pada tahun 1957. Keberhasilan ini jelas menunjukkan kemampuan Soviet untuk membuat sistem peluncuran senjata nuklir dari dalam wilayahnya sendiri untuk mencapai sasaran-sasaran di daratan Amerika Serikat. Konsekuensi dari perkembangan ini adalah bahwa Uni Soviet juga mempunyai kemampuan deterrent terhadap serangan nuklir Amerika Serikat. Pada gilirannya hal ini yang berakibat pada masalah jaminan (nuklir) Amerika Serikat terhadap pertahanan dan keamanan NATO-Eropa. Oleh karena tidak memiliki rudal ICBM yang operasional, Amerika Serikat kemudian menempatkan rudal-rudal nuklir jarak menengahnya (*Intermediate Nuclear Forces, INF*) di negara-negara sekutunya yang secara geografis berdekatan dengan wilayah Soviet. Meskipun negara-negara NATO-Eropa terus bersandar pada strategi *massive retaliation*, kritik terhadap kredibilitas jaminan nuklir Amerika Serikat bagi pertahanan Eropa dilancarkan terutama oleh Prancis yang pada intinya mempersoalkan apakah Amerika Serikat mau mengambil risiko atas New York dan Chicago untuk melindungi Paris dan Bonn.

Karena kekhawatiran timbul "jurang rudal" (*missile gap*), yang kemudian ternyata tidak terbukti, sebagai konsekuensi dari sukses Sputnik, Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk mengintensifkan pembangunan ICBM dan SLBM menjelang akhir dasawarsa 1950-an. Intensifikasi pembangunan ICBM dan SLBM itu kemudian menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang jauh lebih unggul dalam sistem persenjataan strategis daripada Uni Soviet selama dasawarsa 1960-an. Meskipun didahului oleh Sputnik, perkembangan sistem persenjataan strategis pada awal 1960-an telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat memimpin dalam perlombaan senjata jenis ini. Maka tidak terlalu mengherankan jika sejak permulaan dasawarsa itu Amerika Serikat telah mulai meninjau kembali strategi pertahanan NATO dalam menghadapi ancaman Soviet. Hasilnya kemudian adalah strategi *flexible response*

(jawaban luwes) yang memberikan peranan pertahanan konvensional dalam kaitannya dengan pertahanan nuklir.

Tampilnya pemerintahan Kennedy, dan kemudian dilanjutkan oleh Johnson, di Amerika Serikat melahirkan strategi *flexible response* bagi NATO. Dalam pidatonya pada tanggal 28 Maret 1961, Presiden Kennedy antara lain menyatakan bahwa tujuan utama dari kekuatan militer Amerika Serikat adalah untuk maksud-maksud damai -- yaitu bahwa persenjataan itu tidak akan dipergunakan -- untuk menangkai semua bentuk-bentuk perang, baik yang bersifat perang semesta maupun perang terbatas, perang nuklir atau perang konvensional, besar maupun kecil. Pernyataan Kennedy itu kemudian dikembangkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, McNamara, dengan lebih memerinci apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat dalam strategi NATO untuk menghadapi ancaman dan pertahanannya.

Berkaitan dengan berbagai bentuk dan tingkatan ancaman yang dihadapi negara-negara Barat, pada tanggal 16 Juni 1962 McNamara menyatakan bahwa jawaban yang dapat diberikan oleh kekuatan Barat tidak harus terbatas pada persenjataan nuklir, oleh karena untuk menangkai tindakan-tindakan yang tidak melibatkan *massive commitment* -- yaitu kepentingan-kepentingan dan prinsip-prinsip yang paling vital -- tidak harus terbatas pada persenjataan nuklir saja. Pernyataan ini secara implisit sekurang-kurangnya mengakui fungsi persenjataan bukan nuklir untuk menghadapi serangan konvensional lawan. Sebagai konsekuensinya, Amerika Serikat menghendaki kembali ditingkatkannya kemampuan pertahanan konvensional NATO. Dengan meningkatkan kemampuan pertahanan konvensional itu Amerika Serikat berharap peranan persenjataan nuklir dalam strategi NATO akan berkurang. Dengan perkataan lain, persenjataan nuklir harus diberi peranan yang lebih luwes (*flexible*) daripada peranannya dalam strategi *massive retaliation*. Penggunaan dini persenjataan nuklir untuk menghadapi konflik bukan nuklir (artinya, konflik konvensional) akan berakibat pada eskalasi perang nuklir semesta yang boleh jadi tidak seimbang dengan tujuan politik yang ingin dicapai atau dipertahankan. Dalam hubungan nuklir Amerika Serikat - Uni Soviet, kehancuran timbal-balik yang terjamin (MAD) jika terjadi perang nuklir telah tercapai.

Sejalan dengan prinsip yang dianut dalam strategi *flexible response*, fungsi kekuatan konvensional untuk menghadapi serangan konvensional lawan sesedikitnya dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan. *Pertama*, menghadapi kekuatan konvensional dengan kekuatan konvensional diharapkan dapat mengurangi tingkat kerusakan atau kehancuran yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata dari dua kekuatan yang berlawanan. Jika serangan konvensional

lawan secara dini dihadapi dengan penggunaan senjata nuklir, korban di kalangan sipil akibat penggunaan senjata nuklir pasti jauh lebih besar daripada senjata konvensional. Lebih lagi jika pasukan musuh telah memasuki wilayah sendiri, maksud perang untuk mempertahankan dan melindungi penduduk sipil bisa dipertanyakan kalau untuk melawannya dipergunakan senjata nuklir. Akan jatuh korban di kalangan penduduk yang hendak dilindungi dalam jumlah yang sangat besar akibat ledakan nuklir dan radiasi jangka panjang.

*Kedua*, yang tampaknya merupakan tujuan yang lebih penting, untuk menjaga agar konflik yang terjadi dapat dikuasai dengan harapan tidak akan langsung menjadi perang nuklir semesta. Strategi *flexible response* mendasarkan diri pada prinsip graduasi, yaitu menggunakan kekuatan secara bertahap -- tergantung pada jenis konflik yang dihadapi -- dari konvensional hingga senjata strategis. Penggunaan kekuatan konvensional untuk pertama-tama menghadapi agresi konvensional dimaksud tidak saja untuk memberikan waktu untuk memperhitungkan keputusan apa yang akan dihadapi dan pertimbangan untuk ditempuhnya eskalasi ke penggunaan senjata nuklir, tetapi juga untuk membujuk agar lawan bersedia menghentikan konflik di bawah bayangan ancaman eskalasi nuklir. Dengan demikian, perundingan dengan lawan untuk mengakhiri konflik yang sedang berjalan, tanpa harus mengorbankan apa yang sedang dipertahankan, dapat lebih dimungkinkan terjadi dan eskalasi ke penggunaan perang nuklir dapat terhindarkan. Atau, kuatnya pertahanan konvensional dapat "menyadarkan" lawan bahwa memaksakan konflik berkepanjangan, yang dapat membawa ke eskalasi nuklir, tidak sebanding dengan tujuan politik yang hendak dicapai semula.

Dalam sejarah hubungan negara-negara NATO dan Pakta Warsawa memang belum pernah terjadi pengalaman nyata seperti yang dikonstruksikan dalam pemikiran itu. Barangkali justru pengalaman lain dapat dipergunakan sebagai indikasi yang hingga tingkat tertentu dapat mendukung anggapan itu. Konflik perbatasan RRC dan Uni Soviet pada tahun 1969 adalah kasus dari dua negara berkekuatan nuklir yang terlibat dalam konflik konvensional. Perpecahan ideologis dua negara komunis itu yang mulai terjadi sejak menjelang akhir dasawarsa 1950-an mempunyai implikasi dalam hubungan keamanan dua negara. Tuntutan RRC atas wilayah-wilayah di sekitar perbatasannya dengan Uni Soviet, yang dianggap secara tidak sah dikuasai oleh Uni Soviet, menyebabkan ditempatkannya sejumlah besar pasukan kedua negara di sepanjang perbatasan mereka dengan peralatan militer masing-masing yang paling modern. Menjelang akhir dasawarsa 1960-an ketegangan di perbatasan ini diperhebat oleh terjadinya konflik militer secara terbatas di antara mereka. Konflik ini berpuncak dengan ancaman Soviet: yaitu, jika RRC terus melakukan provokasi bersenjata di perbatasan tersebut, Uni Soviet tidak akan



membatasi diri pada penggunaan senjata konvensional saja. Ancaman ini kemudian memaksa RRC untuk memasuki meja perundingan dan kemudian menghentikan konflik konvensional terbatasnya dengan Uni Soviet. Dengan perkataan lain, RRC menghentikan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan terbatasnya di perbatasan dengan Uni Soviet karena menyadari (artinya RRC di sini bertindak sebagai pelaku yang rasional) kemungkinan harga yang harus dibayarnya jauh lebih besar daripada tujuan politik yang hendak dicapai oleh kemungkinan eskalasi ke penggunaan senjata nuklir Soviet.

Dalam strategi *flexible response*, fungsi persenjataan konvensional juga dimaksudkan sebagai penangkal (*deterrent*) terhadap serangan konvensional lawan. Keinginan NATO untuk meningkatkan kekuatan konvensionalnya dimaksudkan agar negara-negara NATO memiliki kekuatan konvensional yang memadai agar mampu menghadapi lawan sesuai dengan jenis agresi yang dilakukan atau dipilihnya. Dimilikinya kemampuan konvensional yang memadai itu pada gilirannya akan menangkal lawan untuk melakukan serangan konvensional. Akan tetapi jika lawan melakukan agresi konvensional juga, dan kemudian terbukti bahwa kekuatan konvensional yang dipergunakan untuk menghadapi agresi tidak berhasil, ancaman eskalasi ke perang nuklir akan mengikutinya. Keadaan demikian akan membuat tujuan politik lawan semula yang terbatas menjadi tidak sebanding dengan risiko yang diakibatkan oleh penggunaan kekerasan. Lawan diharapkan menyadari keadaan seperti ini sehingga akibatnya adalah kekuatan konvensional yang memadai akan lebih memperkuat usaha penangkalan yang diterapkan oleh NATO. (Di sini NATO selalu berangkat dari anggapan bahwa mereka berada dalam posisi sebagai pihak yang bertahan).

Dari uraian mengenai strategi *flexible response* di atas, yang telah diterima oleh NATO sebagai strategi resminya sejak tahun 1967, terlihat bahwa fungsi kekuatan konvensional dalam strategi nuklir sesedikitnya ada dua jenis. Di satu pihak, kekuatan itu harus mampu mencegah, karena itu menangkal, lawan untuk menyerang dan menduduki sebagian wilayah yang ingin dipertahankan. Di lain pihak, kekuatan itu diharapkan dapat mengalahkan, atau sekurang-kurangnya mematahkan, serangan konvensional lawan dalam mencapai tujuan politiknya. Dari sebab itu yang menjadi masalah sekarang adalah berapa besar kekuatan konvensional yang diperlukan untuk memenuhi fungsi tersebut?

### III

Tampaknya prinsip MAD yang terkandung dalam pemikiran strategi *flexible response* dan kebutuhan akan kekuatan nuklir yang memadai tidak perlu

dibicarakan di sini sebab masalah ini telah dibahas dalam tulisan lain tentang "Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat" (*Analisa*, Februari 1986). Jika kekuatan nuklir strategis yang memadai untuk menangkal lawan telah tercapai, usaha penangkalan atas konflik bukan nuklir dilakukan dengan menggunakan kekuatan konvensional seperti dikemukakan di atas. Oleh karena persenjataan nuklir strategis dihubungkan dengan *massive commitment*, maka masih terdapat apa yang disebut sebagai *windows of opportunity* (peluang-peluang yang bisa dieksploitasikan) untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang sifatnya lebih terbatas dengan mempergunakan kekuatan konvensional, karena alasan apapun, dari pihak yang merasa cukup kuat untuk itu. Dalam keadaan demikian itu, pihak yang tidak memiliki kekuatan konvensional yang memadai untuk menghadapi taktik "agresi" lawan yang cukup kuat akan menghadapi kesulitan besar. Karena itulah maka diperlukan adanya kekuatan konvensional yang cukup untuk menghindari (yang tidak lain adalah menangkal) kemungkinan seperti itu.

Meskipun konteks konflik konvensional dapat membawa implikasi eskalasi ke penggunaan persenjataan nuklir, perdebatan mengenai besarnya kekuatan konvensional yang memadai untuk menghadapi kemungkinan konflik konvensional terjadi secara panjang lebar. Masalah ini tidak saja menyangkut pada perbandingan kekuatan konvensional dari dua pihak yang saling berhadapan baik menurut ukuran-ukuran kuantitatif maupun kualitatifnya, tetapi juga menyangkut doktrin dan taktik dalam menggunakan kekuatan konvensional itu sendiri. Perdebatan dalam tubuh NATO mengenai hal ini hingga sekarang masih terjadi, dan tampaknya akan terus terjadi, sebab bidang persenjataan konvensional sendiri, seperti dikemukakan dalam awal telaah ini, selalu mengalami modernisasi. Soalnya mungkin akan menjadi jauh sederhana jika direduksi menjadi soal bahwa penggunaan kekuatan konvensional untuk menghadapi agresi konvensional lawan sebagai tanda awal dari akan segera dipergunakannya senjata nuklir jika pihak yang melakukan agresi tidak segera menghentikan peperangan. Kalau prinsip demikian ini yang diikuti, NATO boleh jadi akan kembali kepada perdebatan yang kurang lebih senada dengan perdebatan mengenai kredibilitas strategi *massive retaliation*.

Dari satu segi, besarnya kekuatan konvensional yang diperlukan akan tergantung pertama-tama pada apakah kekuatan itu dimaksudkan untuk memukul mundur agresi terbatas lawan atau untuk supaya mampu sekurang-kurangnya bertahan dan bila diperlukan memukul mundur kekuatan konvensional lawan yang melakukan serangan secara besar-besaran, dan mungkin dalam waktu yang berkepanjangan. Kesepakatan NATO di Lisabon tahun 1952 misalnya, menghendaki peningkatan kekuatan konvensional NATO dari 25 divisi menjadi 96 divisi dalam waktu singkat. Kekuatan ini akan dipergunakan untuk menghadapi sekitar 140 hingga 175 divisi Soviet yang pada waktu itu

dianggap berkesempatan akan melakukan serangan konvensional secara besar-besaran terhadap Eropa Barat. Akan tetapi setelah persepsi mengenai serangan konvensional secara besar-besaran dari lawan memudar, kebutuhan kekuatan konvensional menjadi berkurang, apalagi kekuatan itu dihubungkan dengan senjata-senjata nuklir taktis untuk menghadapi serangan konvensional lawan. Dalam konflik terbatas antara RRC dan Uni Soviet pada akhir dasawarsa 1960-an, secara relatif kekuatan konvensional yang terlibat terbatas sesuai dengan skala konflik yang terjadi.

Dengan menganggap diri sebagai kekuatan defensif, secara kuantitatif formula yang banyak diterima oleh kalangan NATO adalah dua berbanding tiga. Artinya, untuk setiap serangan yang dilakukan oleh tiga divisi kekuatan konvensional lawan, pihak yang bertahan membutuhkan dua divisi untuk mampu menghadapinya secara efektif. Namun dalam suatu peperangan, jumlah besar kecilnya pasukan belaka bukanlah faktor yang paling menentukan sebab efektivitas kekuatan konvensional tersebut juga tergantung pada segi kualitasnya. Dari segi kualitas ini misalnya dapat disebut pengorganisasian kekuatan, ketangguhan dan kekompakan dalam divisi, moral pasukan, mobilitas dan kecepatan bergerak, standarisasi persenjataan, daya tembak, dan kecakapan serta imajinasi dari setiap satuan pasukan dalam menghadapi suatu pertempuran dan dalam mempergunakan perangkat militernya. Akan tetapi soalnya masih dapat diperumit lagi oleh kenyataan bahwa besarnya kekuatan satu divisi dari sesuatu negara berbeda dengan negara lainnya baik dalam hal personal, perangkat militernya maupun kebutuhan logistik yang mendukung agar fungsi divisi itu dapat optimal.

Dalam kaitan ini, melakukan perbandingan kekuatan konvensional NATO di Eropa dan kekuatan Pakta Warsawa akan selalu melibatkan unsur-unsur seperti itu dan berada di luar cakupan telaah ini. Cukup dinyatakan kiranya bahwa dalam beberapa hal kekuatan konvensional Pakta Warsawa lebih besar daripada NATO sedangkan dalam beberapa hal lainnya kekuatan mereka seimbang; dan dalam beberapa hal lainnya lagi kekuatan NATO lebih unggul daripada Pakta Warsawa. Dari sebab itu adanya keyakinan di beberapa kalangan pemikir strategi NATO bahwa kekuatan konvensional NATO jauh berada di bawah kekuatan konvensional Pakta Warsawa perlu dilihat dengan sangat hati-hati. Selama ini belum pernah terjadi insiden konflik konvensional antara kedua kekuatan tersebut sehingga segala kesimpulan mengenai perimbangan kekuatan kedua belah pihak menjadi persoalan yang sifatnya teoretis. Dengan menggunakan inferensi (mengambil kesimpulan berdasarkan kejadian di tempat lain) konflik di Timur Tengah, di mana persenjataan darat dan udara Israel serupa dengan persenjataan NATO dan persenjataan negara-negara Arab khususnya Suriah serupa dengan persenjataan konvensional Pakta Warsawa, dan dalam banyak hal Israel unggul dalam konflik itu, dapat dika-

takan juga bahwa kekuatan konvensional NATO sekarang-kurangnya seimbang dengan, kalau tidak unggul daripada, kekuatan konvensional Pakta Warsawa.

Kini barangkali menjadi lebih jelas bahwa keunggulan kuantitatif dapat diimbangi, dan bahkan diatasi oleh keunggulan teknologi persenjataan. Pihak yang merasa secara teknologis dalam beberapa hal ketinggalan berusaha untuk mengenjarnya. Akibatnya adalah terjadi perlombaan senjata konvensional, yang tentu saja merupakan perlombaan mahal. Modernisasi kekuatan konvensional dari kedua belah pihak yang saling berhadapan di mandala Eropa itu adalah salah satu cermin dari adanya perlombaan senjata konvensional tersebut. Bahkan dengan modernisasi kekuatan konvensional yang terus diupayakan itu kini justru membuka suatu teori tentang kemungkinan konflik strategis, yang dalam strategi nuklir ini selalu berkonotasi konflik nuklir, dapat dilaksanakan dengan mempergunakan persenjataan konvensional. Untuk mengurangi tingkat perlombaan itu dan lebih memberikan jaminan hubungan keamanan mereka, dua kekuatan itu kemudian bersepakat melakukan perundingan-perundingan untuk membatasi kekuatan konvensional yang ditempatkan di mandala Eropa, dikenal dengan sebutan *Mutual Balanced Force Reduction* (Pengurangan Kekuatan secara Timbal-Balik dan Berimbang).

Dari segi doktrin dan taktik mempergunakan kekuatan konvensional, dalam konflik yang melibatkan dua kekuatan bersenjata nuklir, tampaknya suatu pertahanan yang semata-mata konvensional tidak dapat dilakukan. Dari sebab itu, pertama-tama yang perlu diingat ialah bahwa konflik konvensional, seperti dikemukakan sebelumnya, membawa serta efek eskalasi ke penggunaan senjata nuklir. Dalam pemikiran NATO kaitan itu terwujud dalam penempatan senjata-senjata nuklir taktis dan jarak sedang (*intermediate nuclear forces, INF*) AS di Eropa Barat dan oleh kekuatan nuklir independen Inggris dan Prancis. Dalam strategi Soviet, pemikiran itu secara implisit ditunjukkan oleh adanya ancaman militer terhadap RRC jika yang disebutkan belakangan ini terus melakukan ancaman-ancaman konvensional di perbatasan mereka bersama pada akhir dasawarsa 1960-an seperti telah dikemukakan sebelumnya. Kekuatan INF Amerika yang sekarang ditempatkan di Eropa itu misalnya adalah jenis rudal Pershing-II dan rudal jelajah (*Cruise missiles*), selain AS juga menempatkan kekuatan daratnya, sebagai lambang keterikatan AS dalam pertahanan Eropa. Uni Soviet menempatkan SS-20 baik di mandala Eropa, untuk menghadapi NATO, maupun di wilayah Asia-nya, antara lain untuk menghadapi RRC.

Perdebatan mengenai efektivitas pertahanan dan penangkalan konvensional juga dihadapkan pada masalah bagaimana jika lawan yang mempunyai

kekuatan konvensional yang lebih besar melakukan pendudukan wilayah melalui perang kilat (*blitzkrieg*) sebagai cara untuk mencapainya? Bidang ini sebenarnya telah menyentuh bidang doktrin taktik di medan perang yang sangat rumit karena menyangkut berbagai segi mengenai cara dan sarana untuk menghentikan laju lawan. Perdebatan kini terpusat pada dua pendekatan, yang masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Pendekatan pertama menyatakan bahwa untuk menghadapi lawan secara memadai perlu memperkuat pertahanan terluar sehingga lawan dihalaui sejauh mungkin untuk dapat lebih memasuki wilayah yang dipertahankan. Pendekatan ini disebut sebagai konfrontasi medan langsung (*direct engagement* atau *war of attrition*) dengan menghancurkan kekuatan lawan di medan terdepan. Pendekatan kedua menganjurkan agar dalam menghadapi lawan yang melaju itu sedapat mungkin dihindari terjadinya konfrontasi langsung dan menitikberatkan pada olah gerak cepat (*maneuver*) di medan perang sehingga lawan terkejut dan kemauan serta kemampuan militernya untuk melanjutkan *blitzkrieg* hancur, dan karena itu serangan balasan untuk mematahkannya lebih mudah dicapai. Gagasan ini disebut sebagai strategi *maneuver*. Tentang seluk-beluk dari dua pendekatan tersebut dan mana yang lebih efektif di antara keduanya tidak dibahas di sini karena telah menjadi bagian dari bidang yang sangat spesifik dalam pengerahan kekuatan untuk menghadapi lawan.

Itulah beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam membiarkan tingkat kekuatan konvensional yang dianggap memadai untuk memperkuat deterrent dan pertahanan. Meskipun sebenarnya masih terdapat sejumlah faktor lainnya yang berpengaruh terhadap hal itu, seperti letak dan kedudukan geografis wilayah yang dipertahankan, padat-jarangnya penduduk di sekitar wilayah yang mungkin akan menjadi pusat konflik, tersedianya bala bantuan dan milisi, dan pengorganisasian kekuatan konvensional ke dalam fungsi-fungsi khas untuk memenuhi misi yang diemban, apa yang telah dikemukakan di atas telah menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan mengenai apa yang dianggap sebagai kekuatan konvensional yang memadai dalam strategi nuklir. Kendati demikian, memperkuat kekuatan konvensional hingga tingkat tertentu dianggap akan memperkuat deterrent nuklir guna menghindari terjadinya suatu perang nuklir secara total sebab lawan juga mengerti bahwa untuk mencapai tujuan politik yang terbatas sekalipun makin besar dan kuat kekuatan konvensional yang dibutuhkannya, dan makin besar pula risikonya.

#### IV

Jika peningkatan kekuatan konvensional baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh negara-negara nuklir dipandang sebagai bagian dari usahanya

untuk memperteguh postur kekuatan penangkal dan pertahanan, usaha itu tidak semata-mata berakibat pada negara-negara nuklir sendiri. Telah menjadi rahasia umum bahwa usaha itu juga mempunyai efek terhadap negara-negara lain yang tidak bersenjata nuklir. Bentuk dari efek tersebut yang paling nyata adalah terus meningkatnya transfer senjata-senjata konvensional mutakhir dari negara-negara nuklir ke negara-negara non-nuklir, terutama ke negara-negara Dunia Ketiga yang sering terlibat dalam berbagai konflik baik secara intern maupun dalam tingkatan regional.

Transfer persenjataan konvensional modern dari negara-negara nuklir terjadi hampir ke seluruh penjuru dunia. Sebagai aktor dalam hubungan internasional, khususnya dalam tingkat politik internasional kawasan, banyak negara di berbagai kawasan dunia yang mengandalkan pada pengadaan persenjataan modern sebagai salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan politik dan keamanannya. Sementara kebutuhan itu selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi militer dunia, sebagian besar dari mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memproduksinya sendiri. Karena itu mendatangkan perangkat militer dari luar merupakan salah satu alternatif yang paling umum ditempuh oleh banyak negara. Dan sebagian terbesar dari perangkat militer modern itu hanya diproduksi dan dijual oleh negara-negara nuklir. Terdapat negara-negara Dunia Ketiga yang sepenuhnya menggantungkan diri pada pengadaan senjatanya dari negara (nuklir) tertentu saja, atau dari blok militer dan pertahanan tertentu, apakah itu blok Barat atau blok Timur, seperti dalam kasus Muangthai, Singapura, Filipina, Korea Selatan, Saudi Arabia, Vietnam, dan berbagai negara di Amerika Latin. Di lain pihak, terdapat sejumlah negara lainnya yang memenuhi kebutuhan persenjataan konvensional itu dari sumber-sumber yang ada seluas mungkin, seperti dalam kasus India, Pakistan, Iran, Irak, Libia, Mesir, Nigeria dan Peru.

Terdapat beberapa akibat karena transfer persenjataan modern ke berbagai kawasan dunia itu. *Pertama*, konflik intra-regional boleh jadi meningkat oleh karena makin banyak negara yang merasa "kuat" untuk menghadapi negara tetangganya yang karena alasan-alasan historis, kultural, dan politik-strategis dianggap sebagai saingan atau ancaman. Konflik Israel-Dunia Arab, Iran-Irak, India-Pakistan, Vietnam-Mungthai, dan Korea Selatan-Korea Utara ditopang oleh pengadaan senjata dari negara-negara maju. Karena persenjataan modern makin mahal harganya, konflik intra-regional yang terjadi berarti makin mahal biayanya. Dalam konflik di Lembah Bekaa antara Israel dan Suriah misalnya, dalam waktu singkat Suriah kehilangan lebih dari 80 pesawat tempurnya dari jenis Mig-21 dan Mig-23 serta sejumlah tank T-72. Perang Iran-Irak merupakan contoh lain dari makin mahalnya perang modern sekarang karena selain sasaran-sasaran militer yang dihancurkan juga sasaran-sasaran non-militer, seperti kilang minyak dan tanker.

*Kedua*, perlombaan senjata pada tingkat regional, apakah karena alasan keamanan nasional atau karena alasan lain seperti prestise, merupakan akibat dari transfer senjata juga. India, Pakistan, Korea Selatan, Korea Utara, Israel, negara-negara ASEAN, Suriah, Iran, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Libia, Mesir, Nikaragua, El Salvador, untuk menyebut beberapa saja, dengan tingkat alasan berbeda-beda terlibat dalam usaha untuk selalu mendapatkan jenis persenjataan yang lebih baru. Salah satu contoh yang menarik untuk diikuti dalam kaitan ini misalnya kasus pembelian pesawat tempur F-16 oleh beberapa negara anggota ASEAN. Setelah Muangthai mendapatkan persetujuan untuk membeli pesawat itu dari Amerika Serikat, Singapura dan Indonesia juga mengikuti jejak itu. Jika di antara negara-negara ASEAN terjadi hal demikian itu, diberitakan bahwa Vietnam juga mulai mendapatkan pesawat tempur Mig-23 dari Uni Soviet. Salah satu bahaya dari perlombaan senjata yang bisa terjadi adalah efeknya yang dapat meningkatkan kecurigaan terhadap maksud-maksud negara tetangga tertentu yang dapat berakibat terjadinya konflik militer meskipun hal ini mungkin yang ingin dihindari dengan usaha memperkuat diri.

*Ketiga*, karena harga perangkat militer modern dan pemeliharaannya menjadi makin mahal, konsekuensi lainnya dari transfer senjata adalah makin besarnya alokasi dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan militer dan pertahanan. Untuk beberapa negara Dunia Ketiga barangkali penggunaan sejumlah tertentu dari anggarannya untuk kebutuhan militer dan pertahanan bukan menjadi beban yang sangat berat sehingga tidak terlalu mengganggu dana untuk keperluan sosial-ekonominya. Tetapi untuk banyak negara di Dunia Ketiga yang tidak memiliki cukup sumber daya di dalam negeri sendiri bahkan untuk pembangunan sosial-ekonominya, alokasi dana untuk keperluan militer dan pertahanan berarti menambah beban ekonominya (J. Kusnanto Anggoro dalam terbitan ini lebih memerinci seluk-beluk transfer senjata dari negara-negara maju, khususnya dari negara-negara nuklir, ke negara-negara Dunia Ketiga).

*Akhirnya*, transfer senjata dari negara nuklir ke negara bukan nuklir hingga taraf tertentu dapat diartikan bahwa kemampuan negara-negara non-nuklir untuk menghadapi negara nuklir menjadi meningkat. Sebabnya adalah karena banyak negara sedang berkembang percaya bahwa negara-negara nuklir tidak akan dengan mudah mempergunakan persenjataan nuklirnya dalam menghadapi konflik dengan negara bukan nuklir. Oleh karena itu banyak negara tak bersenjata nuklir secara tegar menghadapi negara nuklir dengan mempergunakan kekuatan konvensional. Yang paling menonjol dalam bidang ini adalah usaha Argentina untuk mendapatkan kedaulatan atas Kepulauan Malvinas (Falkslands) dengan menggunakan kekuatan konvensional, meskipun akhirnya tidak berhasil, dalam dasawarsa 1980-an ini. Insiden yang

terjadi antara Amerika Serikat dan Libia di Teluk Sidra tahun 1986 ini juga menunjukkan adanya "keberanian" suatu negara tidak bersenjata nuklir menghadapi negara nuklir, bahkan negara adikuasa. Penelusuran atas peristiwa-peristiwa pada masa lalu juga dapat menambah rangkaian negara-negara tidak bersenjata nuklir yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat penggunaan senjata konvensional melawan negara nuklir. Di Asia Tenggara kasus yang paling baru adalah konflik antara Vietnam dan RRC di daerah perbatasan mereka.

Tampaklah di sini hasil sampingan dari usaha modernisasi kekuatan konvensional negara nuklir terhadap dunia internasional secara luas. Pada tingkat hubungan antarnegara nuklir, anggapan kuat yang mendasari ditingkatkannya kekuatan konvensional adalah untuk memperkuat deterrent agar lawan tidak secara gegabah mempergunakan kekuatan konvensional untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, sekalipun itu yang sifatnya terbatas. Jika deterrent konvensional ini pun masih gagal, adanya kekuatan konvensional yang memadai dianggap akan mampu sekurang-kurangnya memberi waktu untuk tidak segera dipergunakannya senjata nuklir dalam menghadapi ancaman, dan memungkinkan kedua belah pihak berkomunikasi mengenai situasi yang terjadi di bawah ancaman eskalasi, sehingga konflik dapat di cegah menjadi konflik nuklir. Ditilik dari segi ini tampaknya secara global modernisasi dan peningkatan kekuatan konvensional memberikan sumbangan bagi hubungan keamanan yang lebih stabil di antara negara-negara nuklir dan karena itu mengurangi terjadinya bencana perang dalam tingkat global.

Tetapi dalam kenyataannya peningkatan kekuatan konvensional itu juga berarti peningkatan kekuatan militer negara-negara non-nuklir. Ironi terjadi di sini oleh karena peningkatan kekuatan militer negara-negara non-nuklir di berbagai kawasan tidak dengan sendirinya membantu memantapkan hubungan-hubungan keamanan baik dalam tingkat kawasan sendiri maupun dalam hubungan antara negara kawasan dan negara bersenjata nuklir. Persoalannya dapat menjadi makin rumit jika unsur teknologi dalam persenjataan konvensional memungkinkan terjadinya konflik strategis tanpa harus melibatkan persenjataan nuklir karena gabungan antara jarak jangkauan yang makin besar, ketepatan senjata mencapai sasaran yang semakin baik, dan daya ledak dan daya hancur persenjataan konvensional juga selalu ditingkatkan. Dari sebab itu, usaha-usaha untuk menjadikan dunia yang lebih aman dan stabil tidak dapat dilakukan hanya semata-mata melalui pendekatan kekuatan militer baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan perkataan lain, bidang-bidang sosial, politik dan ekonomi menjadi bagian yang sangat penting untuk dimasukkan sebagai komponen utama dalam usaha-usaha pemeliharaan keamanan dalam hubungan antarnegara.



## REFERENSI

- Betts, Richard K., "Conventional Strategy: New Critics, Old Choices," *International Security* (Spring 1983), hal. 140-162.
- Bracken, Paul, "The NATO Defense Problem," *Orbis* (Spring 1983), hal. 83-106.
- Builder, Carl H., *Strategic Conflict Without Nuclear Weapons*, Rand/R-2980-FF (Santa Monica, California: The Rand Corporation, April 1983).
- Bundy, McGeorge, George F. Kennan, Robert S. McNamara, and Gerard Smith, "Nuclear Weapons and the Atlantic Alliance," *Foreign Affairs* (Spring 1982), hal., 753-68.
- Canby, Steven, *The Alliance and Europe, Part IV: Military Doctrine and Technology*, Adelphi Papers No. 109 (London: The International Institute for Strategic Studies, 1974/1975).
- Carus, W. Seth, "The Bekaa Valley Campaign," *The Washington Quarterly* (Autum, 1982), hal. 34-41.
- de Rose, Francois, "Inflexible Response," *Foreign Affairs* (Fall 1982), hal. 136-150.
- Enthoven, Alain C., "U.S. Forces in Europe: How Many? Doing What?," *Foreign Affairs* (April 1975), hal. 513-32.
- ESECS (The European Security Study) II, *Strengthening Conventional Deterrence in Europe: A Program for 1980s* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1985).
- Facer, Roger L.L., *Conventional Forces and the NATO Strategy of Flexible Response*, Rand/R-3209-FF (Santa Monica, California: The Rand Corporation, January 1985).
- Freedman, Lawrence, *The Evolution of Nuclear Strategy* (London: The International Institute for Strategic Studies, 1981).
- Hunt, Kenneth, *The Alliance and Europe, Part II: Defence with Fewer Men*, Adelphi Papers No. 98 (London: The International Institute for Strategic Studies, 1973).
- Keegan, John, "Nuclear Shadows on Conventional Conflicts," *Parameters*, Journal of the U.S. Army War College (Summer 1985), hal., 12-18.
- Mearsheimer, John J., "Maneuver, Mobile Defense, and the NATO Central Front," *International Security* (Winter 1981/1982), hal. 104-22.
- Quester, George H., "Substituting Conventional for Nuclear Weapons: Some Problems and Some Possibilities," dalam *Nuclear Deterrence: Ethics and Strategy*, ed. by Russell Hardin, John J. Mearsheimer, Gerald Dworkin and Robert E. Goodin (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1985), hal. 245-266.
- Schwartz, David N., *NATO's Nuclear Dilemmas* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1983).